

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
GRUP KERJA SAMA BILATERAL DPR RI**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Internal
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari/Tanggal	: Selasa, 13 Januari 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Pimpinan Lt.2 Gd. Nusantara III
Acara	: 1. Pertemuan dengan Staf Ahli Kementerian Luar Negeri RI; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A. (A-442/F-PKS) / Ketua BKSAP DPR RI
Sekretaris Rapat	: Reny Amir, S.H., M.M., MLI / Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral
Hadir Fisik	: 1. Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A. (A-105/F-PGerindra) / Wakil Ketua BKSAP DPR RI; 2. Bramantyo Suwondo, M.Ir. (A-557/F-PD) / Wakil Ketua BKSAP DPR RI; 3. Prasetyo Hadi / Staf Ahli Kementerian Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga; 4. Kepala Biro KSAP dan Organisasi Internasional; 5. Sekretariat KSB.

I. Pendahuluan

Pertemuan dibuka oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A. (A-442/F-PKS) pukul 09.15 dan rapat tertutup untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan

- a. Pimpinan BKSAP DPR RI mengapresiasi kehadiran Staf Ahli Kementerian Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga guna membahas beberapa isu luar negeri dan koordinasi mekanisme kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerangka kerja sama antarpemerintah dan multilateral.

- b. Staf Ahli Kemlu RI membuka diskusi dengan menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali bertemu dengan Ketua BKSAP sebelumnya, untuk membahas arah kebijakan luar negeri. Pada kesempatan tersebut, pihak Kemlu RI menyampaikan update mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026, yang kemudian dilanjutkan dengan kampanye intensif untuk posisi Presiden Dewan HAM pada 2026, sebagai bagian dari diplomasi hak asasi manusia inklusif Indonesia di tingkat global.
- c. Terkait perkembangan situasi global, dibahas kondisi konflik di Sudan, di mana Kemlu akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pimpinan untuk memastikan posisi Indonesia menghormati kedaulatan wilayah sambil mengevaluasi berbagai ketentuan hukum internasional yang relevan serta implikasi global dan regional. DPR RI sebelumnya telah menyerukan peran aktif Indonesia dalam membantu menyelesaikan perang saudara tersebut dan mendorong dialog damai antara pihak-pihak yang berkonflik.
- d. Terkait dinamika di Timur Tengah, Ketua BKSAP sempat memaparkan pandangan strategis terkait konflik yang kompleks di kawasan tersebut dan perlunya pendekatan diplomasi yang sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen multilateral. Dalam kerangka ini, aspek *second track diplomacy* yang dijalankan oleh parlemen ditekankan sebagai komplementer terhadap *first track diplomacy* pemerintah yang dipimpin oleh Kemlu RI, terutama dalam isu-isu kemanusiaan dan HAM.
- e. Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh menyampaikan komunikasi intens dengan Duta Besar Kuba di Jakarta terkait dukungan Indonesia melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Kuba. Pihak Kuba sebelumnya mengharapkan dukungan dari BKSAP, namun sampai saat ini keputusan lebih lanjut masih menunggu arahan resmi dari Kemlu RI. Demikian halnya dengan Iran, di mana posisi Indonesia perlu dijabarkan dengan jelas agar Pimpinan BKSAP dapat mengkomunikasikan posisi politik Parlemen Indonesia yang sesuai dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan pemerintah.
- f. Dalam konteks koordinasi parlemen dan pemerintah, Pimpinan BKSAP menekankan pentingnya menunjuk *person in charge* yang dapat menjalin komunikasi secara *real time* untuk menginformasikan posisi resmi Indonesia terhadap isu mendesak terhadap negara-negara yang berpotensi mengalami konflik atau krisis. Hal ini dinilai penting untuk respons cepat dan konsisten antara Pemerintah dan Parlemen, terutama dalam menghadapi dinamika global yang cepat berubah.
- g. Terkait agenda kerja sama bilateral, Kemlu juga meminta pembaruan tentang status ratifikasi perjanjian dengan Vietnam, yang kemudian didiskusikan termasuk aspek perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan implikasi kerja samanya, yang akan dibahas lebih lanjut melalui komisi terkait di DPR. Isu dukungan terhadap resolusi atau pendekatan terhadap konflik di Myanmar juga muncul; Pimpinan BKSAP menyatakan bahwa tindak


lanjutnya akan diperiksa kembali agar selaras dengan pendekatan diplomasi nasional dan mekanisme multilateral yang berlaku.

- h. Terkait isu visa pelajar, Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo menyampaikan bahwa Indonesia sejauh ini tidak memiliki visa khusus yang secara spesifik ditetapkan untuk pelajar, sehingga setiap tahun perizinan masih perlu diperbarui. Kemlu RI mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah membedakan kategori kunjungan singkat, kunjungan panjang, dan visa multi-masuk yang relevan bagi pelajar, termasuk implementasi skema beasiswa seperti Dharmasiswa yang telah berjalan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini, Kemlu menilai koordinasi sudah berada dalam peraturan menteri untuk pemberian izin tinggal belajar, meskipun masih perlu penguatan kebijakan agar durasi studi, misalnya program dua tahun, dapat diterima secara lebih fleksibel di perguruan tinggi tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Terkait dengan isu teknis pemberian kewarganegaraan Indonesia yang memerlukan kajian lebih mendalam berdasarkan penelitian aturan yang berlaku, sebelum kebijakan tersebut dapat diformulasikan.
- i. Sebelum pertemuan berakhir, Staf Ahli Kemlu RI menyampaikan pada dalam waktu dekat akan ada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) sebagai forum tahunan bagi Menteri Luar Negeri RI untuk menyampaikan capaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun sebelumnya serta prioritas dan arah kebijakan luar negeri di tahun mendatang. Forum ini mencakup isu-isu strategis seperti kerja sama ekonomi, hubungan bilateral dan multilateral, keamanan regional, hingga kontribusi Indonesia dalam forum global. PPTM juga menjadi momen untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi aktif. Kedepannya, diharapkan kedua pihak terus bersinergi memadukan perspektif legislatif dengan kebijakan luar negeri pemerintah dalam menghadapi tantangan global kontemporer dan peluang peran Indonesia di forum internasional.

III. Penutup

Rapat diakhiri dengan foto bersama pada pukul 09.45 WIB.

Jakarta, 13 Januari 2026
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Reny Amir, S.H., M.M., MLI
197305121992032001